

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Bantul)

IBNU KHAIRUDIN*

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Limkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta, 55183, Telp +274 387656, Indonesia.

*Corresponding Author, E-Mail address: 27khrdnibnu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Regional Financial Accounting System Understanding and The Application of Technology Information to The Quality of Financial Report with Human Resource Competency as a moderator variable on Sleman Regency and Bantul Regency. In this study sample of 76 respondents were selected using purposive sampling. Analysis tool used in this study is the Moderator Regression Analysis (MRA).

Based on the analysis that have been made the results are the regional financial accounting system understanding, the application of technology information and human resource competency positively and significantly influence quality of financial report. While human resource competency who moderated regional financial accounting system understanding positively and significantly influence to the quality of financial report.

Keywords: Regional Financial Accounting System Understanding, The Application of Technology Information, Human Resource Competency and The Quality of Financial Report.

PENDAHULUAN

Saat ini akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga masyarakat menaruh perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada saat dahulu. Dalam perkembangannya yang kian pesat kini organisasi sektor publik menghadapi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat baik di pusat maupun daerah. Badjuri dan Trihapsari (2004) dalam Sukmaningrum (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan

untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur dapat berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Laporan keuangan yang baik dan benar serta berkualitas tidak dapat lepas dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Masih terbatasnya aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan kompetensinya menjadikan kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang menjadikan informasi dalam laporan keuangan jauh dari kata baik dan benar serta masih banyak mengandung kesalahan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah daerah tersebut kurang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi.

Selain kompetensi sumber daya manusia, faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Di zaman sekarang teknologi sangat penting dalam membantu mempercepat segala proses yang nantinya pengeluarannya lebih cepat dan lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut dan diharapkan dapat menyediakan informasi akuntansi

dalam laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Minimnya aparatur yang ada di pemerintah daerah dalam pengaplikasian teknologi informasi berdampak pada kualitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Nurillah, 2014).

Hal lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan standar akuntansi pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang tujuannya agar laporan keuangan lebih accountable dan memiliki kualitas yang tinggi. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memahami Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan benar demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. SAKD yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).

Padahal tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis (Ankarath dkk., 2012). Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2004:12) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2002), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Sangatlah bermanfaat dan berguna informasi yang ada di dalam laporan keuangan dipahami oleh para pengambil keputusan. Segala informasi yang ada di laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian daerah dan lain-lain. Oleh karena itu

pemerintah daerah wajib memperhatikan dengan cermat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Menurut Lestari (2013) teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, sehingga steward mempunyai perilaku di mana tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain (Usamah dalam Lestari, 2013).

Teori ini memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun shareholders pada khususnya (Puspitarini dalam Lestari, 2013). Teori ini memandang manajemen (pemerintah daerah) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaiknya-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders/principals (para pengambil keputusan). Konsep pada teori ini didasarkan pada asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, di mana aparatur di pemerintah daerah dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas yang diperuntukkan dan dipergunakan oleh publik dan para pengambil keputusan ekonomi.

Pengaruh pemahaman SAKD terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Salah satu usaha untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Di dalam SAP terdapat sistem akuntansi pemerintah yang menjadi alur dalam penyusunan laporan keuangan baik di pusat maupun di daerah. Pemahaman terhadap SAKD sangatlah penting bagi setiap aparatur pemerintah daerah karena di dalamnya termuat berbagai prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan demi untuk terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2008) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2015) menyatakan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Xx Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemahaman SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh perorangan tetapi juga pada organisasi, contohnya organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Manfaat yang diberikan oleh teknologi informasi sangatlah besar, salah satunya adalah kecepatan dalam memproses suatu data serta keakuratan data yang diolah juga sangatlah

terjamin. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi wajib bagi setiap aparaturnya pemerintah daerah supaya laporan keuangan yang disusun baik dan benar agar nantinya laporan keuangan tersebut dapat dijadikan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahro (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Agustawan dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar serta proses dalam pengambilan keputusan.

Informasi-informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus bermanfaat yang artinya informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan secara maksimal. Maka dari itu sumber daya manusia di pemerintah daerah harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi karena kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya (Assidiqi, 2016) supaya tujuan suatu organisasi terwujud dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Assidiqi (2016) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Albab (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM juga berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2013) juga menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) menyatakan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2010) menyatakan bahwa kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD

Pengaruh kompetensi SDM terhadap hubungan pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yakni LKPD yang baik dan benar

dengan dengan mengacu SAP. Sumber daya yang berkompeten harus memiliki karakteristik yg terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan perilaku agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai. Maka dari itu dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi untuk dapat memahami SAKD secara keseluruhan agar dapat tercipta laporan keuangan daerah yang berkualitas. Dari penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas laporan keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015). Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa penerapan SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kompetensi SDM sebagai variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara pemahaman SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan beberapa peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD

Pengaruh kompetensi SDM terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD

Pada zaman seperti sekarang ini teknologi informasi berupa komputer sangatlah menunjang berbagai aktivitas dan operasi. SDM yang memiliki kompetensi tinggi haruslah memiliki skill dalam menggunakan teknologi informasi saat ini agar suatu data dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan adanya SDM yang berkompeten mengolah data akuntansi dengan komputer atau teknologi lainnya maka dapat terwujudnya keefektifan dan keefisienan serta keakuratan dan kecepatan dalam menyusun laporan keuangan mencapai kualitas yang tinggi. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan

antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan. Dari pernyataan peneliti tersebut dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Obyek dalam penelitian ini berlokasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan peneliti memilih anggota sampel yang sekiranya dapat memberikan prospek yang baik bagi perolehan data yang akurat. Sampel dalam penelitian ini adalah staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang sudah bekerja selama 1 tahun lebih pada 15 SKPD di Kabupaten Sleman dan 15 SKPD di Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur dengan cara menyebarkan kuesioner tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah. Sesuai dengan pengertian yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kualitas adalah kadar, mutu, ataupun taraf. Menurut Suwardjono dalam (Ariesta, 2013) laporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disajikan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.

2. Variabel Independen (X)

Pemahaman SAKD

Menurut definisi dari KBBI pemahaman atau paham adalah mengerti benar. Lalu pengertian SAKD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD (Albab, 2015). Pemahaman SAKD adalah kemampuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menyusun proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan. Pemahaman terhadap SAKD sangatlah penting bagi aparatur pemerintah daerah supaya dapat terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan daerah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut pengertian atau definisi dari KBBI pemanfaatan adalah cara menggunakan. Pengertian menurut Wikipedia teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Adapun pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Winidyaningrum dalam Arfianti, 2011).

Kompetensi SDM

Menurut Guy et al, dalam Nurillah (2014) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian individu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan SDM adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas (Gomes, 2003:1). Lalu menurut Widodo dalam (Arfianti, 2011) kompetensi SDM adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

3. Variabel Moderasi (Z)

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kompetensi SDM. Menurut Guy et al, dalam Nurillah (2014) kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian individu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan SDM adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas (Gomes, 2003:1). Lalu menurut Widodo dalam (Arfianti, 2011) kompetensi SDM adalah kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah 15 SKPD di Kabupaten Sleman dan 15 SKPD di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah pegawai dari masing-masing SKPD yang bersedia untuk mengisi kuesioner mengenai kualitas laporan keuangan daerah, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti selama bulan Mei tahun 2017, peneliti hanya menyebarkan 90 kuesioner kepada responden dan mengambil kuesioner tersebut satu minggu setelah waktu penyebaran. Data yang berhasil kembali didapatkan oleh peneliti adalah sebanyak 76 kuesioner.

Uji Kualitas Instrumen

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil dari data analisis, nilai signifikan hasil uji validitas yang diperoleh untuk seluruh item kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan dalam instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil dari data analisis, nilai *cronbach's alpha* yang diperoleh dalam uji realibilitas untuk seluruh instrumen lebih dari 0,70, maka dapat disimpulkan seluruh instrumen penelitian yang digunakan adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil dari data analisis, bahwa nilai signifikansi hasil uji normalitas yang diperoleh pada model 1 sebesar 0,211, model 2 sebesar 0,655 dan model 3 sebesar 0,165 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari seluruh model penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil dari data analisis, bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh lebih dari 0,1 dan nilai VIF yang diperoleh kurang dari 10 dari uji multikolinieritas di seluruh model, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari data analisis, bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen dalam uji heteroskedastisitas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas pada analisis regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui kelayakan pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel independen (bebas) terhadap variabel independen (terikat).

Model 1

Berdasarkan hasil dari data analisis, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah baik dengan tingkat kepercayaan = 0,05, berarti variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD) Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Kompetensi SDM (KSDM) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD).

Model 2

Berdasarkan hasil dari data analisis, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah baik dengan tingkat kepercayaan = 0,05, berarti variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD) dan Moderasi PSAKD*KSDM secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD).

Model 3

Berdasarkan hasil dari data analisis, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah baik dengan tingkat kepercayaan = 0,05, berarti variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Moderasi PTI*KSDM secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dilakukan untuk dapat mengetahui berapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait. Nilai determinasi diperoleh dari nilai Adjusted R Square.

Model 1

Berdasarkan hasil dari data analisis uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,721 yang berarti 72,1% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) dapat dijelaskan oleh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Kompetensi SDM (KSDM) lalu untuk sisanya yaitu 27,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Model 2

Berdasarkan hasil dari data analisis uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,553 yang berarti 55,3% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) dapat dijelaskan oleh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD) dan Moderasi PSAKD*KSDM lalu untuk sisanya yaitu 44,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Model 3

Berdasarkan hasil dari data analisis uji koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,705 yang berarti 70,5% variasi besarnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) dapat dijelaskan oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dan Moderasi PTI*KSDM lalu untuk sisanya yaitu 29,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji T

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t sebagai berikut.

Uji Hipotesis 1

TABEL 1
Hasil Analisis Regresi Model 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5,276	2,084		2,532	,014		
	PSAKD	,347	,146	,202	2,381	,020	,489	2,047
	PTI	,649	,115	,495	5,631	,000	,456	2,193
	KSDM	,546	,213	,276	2,562	,012	,305	3,282

a. Dependent Variable: KLKD

Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat diketahui pada bahwa nilai signifikan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) sebesar $0,020 < 0,05$ dengan nilai *unstandardized coefficients* 0,347. Artinya Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga H_1 diterima. Pengelolaan keuangan yang baik dan benar tidak terlepas dari sebuah sistem yang menjadi pedoman berjalannya suatu aktivitas sehingga jika sistem sudah dipahami lalu diterapkan dengan oleh aparatur baik maka nantinya pun aktivitas tersebut akan berjalan dengan baik pula.

Uji Hipotesis 2

TABEL 2
Hasil Analisis Regresi Model 1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5,276	2,084		2,532	,014		
	PSAKD	,347	,146	,202	2,381	,020	,489	2,047
	PTI	,649	,115	,495	5,631	,000	,456	2,193
	KSDM	,546	,213	,276	2,562	,012	,305	3,282

a. Dependent Variable: KLKD

Berdasarkan pada tabel 2 dapat diketahui pada bahwa nilai signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai *unstandardized coefficients* 0,649. Artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis kedua diterima. Peran teknologi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangatlah membantu aparatur daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengaplikasikan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik dan para pemakai laporan keuangan.

Uji Hipotesis 3

TABEL 3
Hasil Analisis Regresi Model 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,276	2,084		2,532	,014		
	PSAKD	,347	,146	,202	2,381	,020	,489	2,047
	PTI	,649	,115	,495	5,631	,000	,456	2,193
	KSDM	,546	,213	,276	2,562	,012	,305	3,282

a. Dependent Variable: KLKD

Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui pada bahwa nilai signifikan Kompetensi SDM (KSDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) sebesar $0,000 < 0,12$ dengan nilai *unstandardized coefficients* 0,546. Artinya Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya memang mendukung suatu aktivitas berjalan dengan baik. Laporan keuangan daerah yang berkualitas tinggi tidak terlepas dari aparatur daerah yang memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang akuntansi, karena apabila aparatur daerah tidak memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang tersebut maka laporan keuangan daerah yang tercipta tidak akan mengandung informasi yang bermanfaat. Maka dari itu untuk mencapai penyusunan laporan keuangan yang berkualitas perlu dibutuhkan kompetensi dari sumber daya manusia supaya laporan keuangan pemerintah daerah kualitas yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi para pemakainya.

Uji Hipotesis 4

TABEL 4
Hasil Analisis Regresi Model 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	24,963	3,393		7,357	,000		
	PSAKD	-,508	,327	-,332	-1,555	,124	,131	7,634
	PSAKDxKSDM	,056	,011	1,051	4,928	,000	,131	7,634

a. Dependent Variable: KLKD

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui pada bahwa nilai signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap hubungan antara Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (PSAKD) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai *unstandardized coefficients* 0,056. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berperan dalam pentingnya menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah demi tercapainya laporan keuangan daerah yang berkualitas. Organisasi sektor publik dalam

hal ini adalah SKPD dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah hendaknya memiliki sumber daya yang berkompetensi sesuai dengan kemampuannya agar keberhasilan suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang maksimal.

Uji Hipotesis 5

TABEL 5
Hasil Analisis Regresi Model 3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,481	2,384		6,075	,000		
	PTI	,333	,208	,241	1,602	,114	,175	5,729
	PTIxKSDM	,032	,008	,620	4,126	,000	,175	5,729

a. Dependent Variable: KLKD

Berdasarkan pada tabel 5 dapat diketahui pada bahwa nilai signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) terhadap hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD) sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai *unstandardized coefficients* 0,032. Artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah sehingga hipotesis kelima diterima. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia serta didukung dengan teknologi informasi yang memadai dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang bertujuan untuk menyampaikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Semakin baik pemahaman aparatur daerah mengenai sistem akuntansi keuangan daerah semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disusun.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Semakin besar teknologi informasi diterapkan oleh aparatur daerah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang disusun.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparatur daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang disusun.
4. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang disusun.
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan SKPD. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disusun.

Saran

Dari keterbatasan penelitian yang telah disebutkan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperbanyak jumlah sampel serta responden di setiap lokasi survey agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya memperluas area penelitian tidak hanya di dua kabupaten tetapi semua wilayah Provinsi DIY yang terdiri dari Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunung Kidul.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat menjelaskan Kualitas Laporan Keuangan Daerah seperti Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan lain-lain yang berpengaruh.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih tidak terlepas dari keterbatasan yang dimungkinkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain yaitu:

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit (30 SKPD), sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di dua kabupaten yaitu di SKPD Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul sehingga belum dapat digeneralisasikan. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah dan memperluas lokasi survey penelitian.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel saja yaitu Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah dari SKPD di mana persentase dari penjelasan ketiga variabel tersebut masih terlalu kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim (2002). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- A. Nandakumar, Kalpesh J. Mehta, Dr. T. P. Ghosh, Dr. Yass A. Alkafaji (2012). *Memahami IFRS*. Penerbit Indeks. Jakarta Barat.
- A. Supriyanto (2005). *Pengantar Teknologi Informasi*. Penerbit Salemba Infotek. Jakarta.
- Agustiawan dan Rasmini. 2016. *Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Moderasi*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(10), (ISSN: 2337-3067). Bali.
- Albab, Farah Nisa UL. 2015. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Andini dan Yusrawati. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I, 24(1), 65-82. Riau.
- Andriani, W. (2012). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan)*. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 5(1), 69-80, (ISSN: 1858-3687). Padang.
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ariesta, F. (2013). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Assidiqi, Muhammad Hasby. 2016. *Dampak Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Azzahro, Dara Fatimah. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dewi dan Putra. 2016. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada Integritas Laporan Keuangan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15(3), (ISSN: 2302-8556). Bali.

<http://economy.okezone.com/read/2016/10/08/320/1509565/top-review-catatan-bpk-untuk-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-dan-daerah>, diakses pada 24 November 2016.

<http://kbbi.co.id/arti-kata/kualitas>, diakses pada 16 Desember 2016.

<http://kbbi.web.id/paham>, diakses pada 16 Desember 2016.

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-transparansi-menurut-ahli.html>, diakses pada 7 Desember 2016.

<http://www.jpnn.com/read/2016/10/23/476038/Wuihh!-BPK-Ungkap-Kerugian-Negara-Rp-76-Miliar-di-Jatim->, diakses pada 24 November 2016.

http://www.ksap.org/sap/id_ID/standar-akuntansi-pemerintahan/, diakses pada 8 Desember 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi, diakses pada 16 Desember 2016.

Karimah, Annisa. 2015. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Latar Belakang Pendidikan, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Lestari, Vivi. 2013. *Bukti Mengenai Dampak Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Audit Fee*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nurillah, As Syifa. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Puspitarini, N. D. (2012). *Peran Satuan Pengawasan Intern dalam Pencapaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Berstatus PK-BLU*. Accounting Analysis Journal 1(2), (ISSN: 2252-6765). Semarang.

Putro, Prima Utama Wardoyo. (2013). *Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

S. Pratolo, R. Yaya, H. Sofyani (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Danisa Media. Yogyakarta.

Sembiring, Febriady Leonard. (2013). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)*. Skripsi. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Sudrajat dan Omposunggu. 2015. *Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP 2(2), 193-202 (ISSN: 2339-1545). Jakarta Selatan.

Sukmaningrum, Tantriani. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp, diakses pada 14 Desember 2016.

Zoelisty, Capridiea. (2014). *Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.